



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- b. bahwa Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 155 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi karena adanya pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Ombudsman tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1283);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN TENTANG TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Ombudsman ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ombudsman Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada anggaran Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ombudsman Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 155 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Ketua Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2026

a.n. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,

#

RAHMADI INDRA TEKTONA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

JABATAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN
Pembina		Dr. Rahmadi Indra T. S.H., M.H. / Wakil Ketua Ombudsman RI
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi		Syafrida R., S. H., M.H. / Anggota Ombudsman RI.
Atasan PPID		Sekretaris Jenderal
PPID Utama		Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
PPID Perwakilan Ombudsman RI		
1.	Provinsi Aceh	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Aceh
2.	Provinsi Sumatera Utara	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumater Utara
3.	Provinsi Riau	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau
4.	Provinsi Sumatera Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Barat
5.	Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi
6.	Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan
7.	Provinsi Bengkulu	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu
8.	Provinsi Bangka Belitung	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bangka Belitung
9.	Provinsi Lampung	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Lampung
10.	Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau
11.	Provinsi Jakarta Raya	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jakarta Raya
12.	Provinsi Jawa Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat
13.	Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah
14.	Provinsi D.I. Yogyakarta	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi DI. Yogyakarta
15.	Provinsi Jawa Timur	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi

JABATAN DALAM TIM		NAMA/JABATAN
		Jawa Timur
16.	Provinsi Banten	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten
17.	Provinsi Bali	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali
18.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Nusa Tenggara Timur
20.	Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Barat
21.	Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah
22.	Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Timur
24.	Provinsi Kalimantan Utara	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara
25.	Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara
26.	Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan
28.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tenggara
29.	Provinsi Gorontalo	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Gorontalo
30.	Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat
31.	Provinsi Maluku	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku
32.	Provinsi Maluku Utara	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Maluku Utara
33.	Provinsi Papua Barat	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua Barat
34.	Provinsi Papua	Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Papua
Perangkat PPID		
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator		Maharandy F. Monoarfa
Anggota		1. Heru Tjahjono 2. Nurul Istiamuji 3. Siti Fatimah 4. Muhammad Ridho
Bidang Pengelola Data dan Dokumentasi		
Koordinator		Indra Dwi Aprianto

JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
Anggota	1. Tety Yuniarti 2. Eko W. Widjiantoro
Bidang Pengelola Sistem Teknologi Informasi	
Koordinator	Aprilistyo Dwi Hanafi
Anggota	Gunawan Riyanto
Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Konsultasi Hukum	
Koordinator	Panji Jaya Laksana
Anggota	1. Anita Widyaning Putri 2. Cahya Rahmadhani 3. Dwi Hartanto 4. Teuku Ryan Herdiansyah 5. Almah Ristanti

a.n. KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA,

TTD.

RAHMADI INDRA TEKTONA